



## Collaborative Governance Melalui Gerakan Orang Tua Asuh Di Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang

Dini Amalia Prawansa<sup>1</sup>, Nanan Sujana<sup>2</sup>, Irfan Arif Kurniawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

---

### Abstrak

Received: 15 Desember 2023  
Revised: 29 Desember 2023  
Accepted: 05 Januari 2024

*Stunting merupakan salah satu isu nasional dimana penanggulangannya masih terus dilakukan hingga saat ini. Permasalahan stunting merupakan masalah jangka panjang yang berdampak pada masa depan bangsa dan menjadi beban negara, Kecamatan Legok merupakan salah satu kecamatan yang memiliki angka stunting yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan kolaborasi yang dibangun dalam penurunan stunting di Kecamatan Legok melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh serta mengetahui faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi kolaborasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang berjalan cukup efektif dengan melihat fenomena dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan hasil sementara.*

**Keywords:** *Stunting, Collaborative Governance, Gerakan Orang Tua Asuh Kecamatan Legok*

(\*) Corresponding Author: [diniamalia143@gmail.com](mailto:diniamalia143@gmail.com)

**How to Cite:** Prawansa, D. A., Sujana, N., & Kurniawan, I. A. (2024). Collaborative Governance Melalui Gerakan Orang Tua Asuh Di Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10485587>.

---

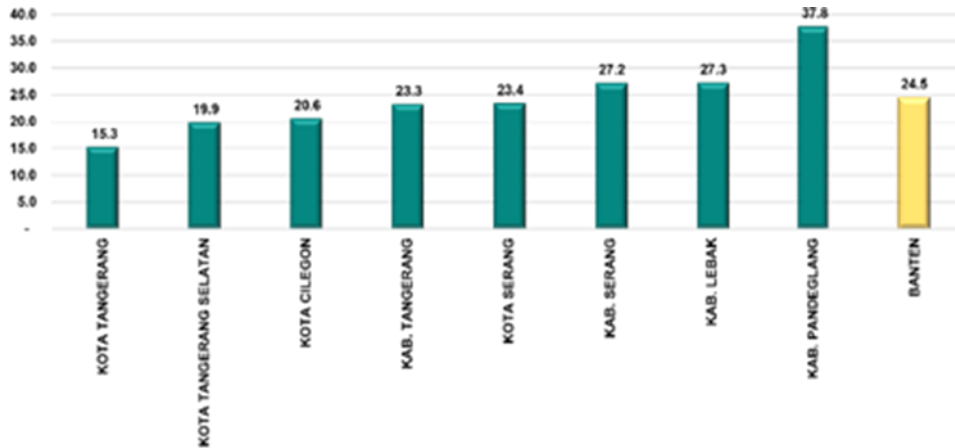
## PENDAHULUAN

Masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya ini yang disebut *Stunting*. *Stunting* adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. (Kemenkes 2018). *Stunting* merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia yang menjadi program nasional dan masih terus diperbaiki hingga saat ini karena stunting menjadi salah satu indikator keberhasilan kesejahteraan masyarakat meliputi pendidikan dan juga pendapatan.

Berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting pada balita tercatat 27,76% (Kominfo 2021). Angka pravalensi stunting di Indonesia ini masih lebih tinggi dibandingkan toleransi maksimal angka stunting yang ditetapkan *World Health Organization* (WHO), yaitu kurang dari 20%. Pemerintah telah memberikan perhatian besar terhadap pencegahan stunting, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang sekarang digantikan menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah untuk perbaikan gizi, stunting, juga bertepatan dengan satu dekade bergabungnya Indonesia dengan gerakan *global Scaling Up*

*Nutrition* (SUN) sejak 2011, dengan fokus pada upaya pengentasan masalah gizi melalui keterlibatan lintas sektor (Bappenas 2021).

Banten sebagai salah satu provinsi yang saat ini masih dihadapkan dengan permasalahan *stunting*. Data terbaru dari hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, menyatakan Provinsi Banten mengalami peningkatan prevalensi *stunting* menjadi 24,5%. Nilai tersebut, melampaui kondisi *stunting* secara nasional pada tahun yang sama, justru mengalami penurunan menjadi 24,4% (Kemenkes RI dan SSGI. 2021). Sebaran prevalensi *stunting* berdasarkan Kabupaten dan Kota di



Provinsi Banten Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

### **Sebaran Prevalensi Stunting Berdasarkan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Tahun 2021**

*Sumber: (Kemenkes RI dan SSGI. 2021)*

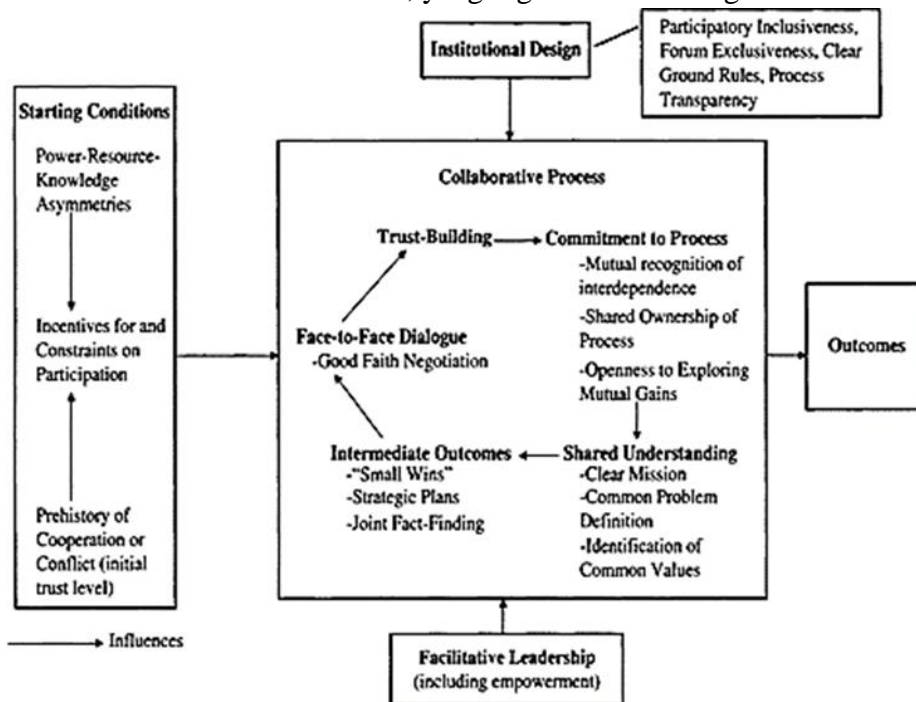
Melihat masih tingginya angka *stunting* di kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, untuk mempercepat penurunan *stunting* di Kabupaten Tangerang, Pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tangerang dan Surat Keputusan Bupati No.050/Kep.403-Huk/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Tangerang. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia yang harus diatasi secara multisektor. Selain itu, berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 bahwa upaya percepatan penurunan *stunting* menjadi salah satu dari proyek prioritas.

Dengan adanya pembentukan Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Tangerang, maka seluruh Camat Kabupaten Tangerang melakukan koordinasi dengan seluruh Lurah/Kepala Desa terkait dengan penanganan *stunting* di Kelurahan/Desa. Kabupaten Tangerang terbagi menjadi 29 kecamatan, 28 kelurahan dan 246 desa. Salah satunya ialah Kecamatan Legok yang dimana masih adanya permasalahan *stunting* yakni sebanyak 349 balita, sehingga pemerintah Kecamatan Legok melaksanakan koordinasi dengan seluruh Lurah/Kepala Desa dalam penurunan *stunting*. Pemerintah Kecamatan Legok bersama Polsek Legok dan Koramil Legok serta para pengusaha setempat berkolaborasi dengan TP PKK, serta stakeholders lainnya bergotong royong bersama-sama turut serta mempercepat penurunan *stunting*

dalam aksi yang nyata yaitu Gerakan Orang Tua Asuh dalam rangka percepatan penurunan *stunting* bersama Tni, Polri dan Swasta di kecamatan legok.

Dari hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan *stunting* merupakan permasalahan yang kompleks sehingga tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah bidang kesehatan saja, namun diperlukan adanya kerjasama dengan stakeholders lintas sektor. Proses kerjasama antara semua pihak yaitu pemerintah, non pemerintah, swasta, bahkan masyarakat dalam upaya penurunan dan penanganan *stunting* dinamakan kolaborasi. Hal ini sesuai dengan pengertian *collaborative governance* menurut “Ansell dan Gash” (2007:544) adalah “serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan non-state didalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan pertimbangan yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengatur program publik.”

Menurut Ansell dan Gash (2007). Model *Collaborative governance* memiliki empat variabel luas yang menjadi rujukan yaitu Kondisi Awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan Fasilitatif dan Proses Kolaborasi. Kondisi Awal dalam *Collaborative Governance* sangat menentukan dasar dari tingkat kepercayaan, masalah/konflik serta modal sosial yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam *Collaborative Governance*. Desain kelembagaan menjadi aturan dasar dalam kegiatan kolaborasi, serta kepemimpinan yang menjadi mediator sekaligus fasilitator dalam *Collaborative Governance*. Sedangkan Proses Kolaborasi menjadi inti dari *Collaborative Governance* dimana dalam proses kolaborasi terdapat Face to face Dialogue, membangun Kepercayaan, membangun komitmen, berbagi pemahaman serta hasil sementara, yang digambarkan sebagai berikut:



**Model Collaborative Governance Ansell & Gash (2007)**

Sumber: *Journal of Publik Administration Research and Theory*

**METODE**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberi gambaran faktual mengenai kolaborasi dalam penanggulangan stunting melalui Gerakan Orang Tua Asuh di Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. Kemudian, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara, pengumpulan dokumen dan studi kepustakaan yang terkait dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses *Collaborative Governance* Melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh Dalam Upaya Penurunan Stunting di Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang.

### A. Kondisi Awal

Kondisi awal pada Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang terdapat beberapa permasalahan diantaranya, kondisi kesehatan dan kondisi sosial masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pertumbuhan gizi yang kurang. Sehingga, menyebabkan pada Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang memiliki angka stunting yang tinggi. Angka stunting di kecamatan legok kabupaten tangerang pada tahun 2020 mencapai angka 410 jiwa atau 5.77 % dalam 1 wilayah kecamatan legok. Camat kecamatan legok memberikan penanganan pertama dalam menyikapi permasalahan stunting di kecamatan legok kabupaten Tangerang melalui *collaborative governance* atau kolaborasi dalam upaya penangan permasalahan *stunting* dikarenakan Pemerintah menyadari bahwa permasalahan *Stunting* berasal dari banyak faktor yang tidak bisa dihadapi oleh pemerintah sendiri. Oleh karna itu, dalam program Gerakan Orang Tua Asuh di Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang ini merangkul banyak pihak yang terlibat bersama Koramil, Polsek, Puskesmas, PKK, Swasta, dan Masyarakat.

Kemampuan sumber daya manusia yang memadai di Kecamatan legok dapat membantu jalannya kolaborasi. Ahli gizi dari bidang kesehatan di Puskesmas berperan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai gizi balita stunting. Dengan adanya ahli gizi yang mendampingi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan penangan *stunting* dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penangan *stunting* dengan memperhatikan gizi balita, bagaimana komposisi karbohidrat dengan proteinnya. Edukasi tersebut diharapkan dapat mempengaruhi tingginya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di posyandu yang diadakan oleh puskesmas dan Kader PKK. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan juga berkerja sama oleh Babinsa dan Binamas sebagai orang tua asuh yang memberikan arahan awal dengan pendekatan oleh keluarga balita stunting.

Menurut Ansell and Gash (2007) Kondisi awal ini yang kemudian menjadi pemicu timbulnya keinginan para pihak yang terlibat untuk melakukan kolaborasi baik itu dari pemerintah dan lembaga lainnya untuk turut terlibat. Keinginan atau kebutuhan kolaborasi akan timbul apabila telah merasakan suka duka bersama, yang secara tidak langsung menumbuhkan kesetiakawanan melalui bentuk kerjasama bersama atau kolaborasi. Suka duka bersama para penggagas atas permasalahan *stunting* dan para pihak yang terlibat juga pernah menjalankan kolaborasi sebelumnya ini menjadi kondisi awal yang membangkitkan keinginan, insentif dan kebutuhan melalui bentuk kerjasama atau kolaborasi Gerakan Orang

Tua Asuh dalam upaya penurunan stunting di Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang.

#### B. Desain Kelembagaan

Menurut Ansell And Gash (2007) bahwa aspek penting lain yang perlu mendapat perhatian adalah kejelasan aturan dan prosedur. Peraturan harus ditegakkan secara adil, transparan dan terbuka, sehingga para pemangku kepentingan dapat meyakini bahwa setiap musyawarah dan negosiasi yang dilakukan adalah nyata dan bukan sekedar basa-basi untuk menutupi kesepakatan rahasia.

Dalam penanganan stunting di Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang kolaborasi yang terbangun berdasarkan kepercayaan, kesamaan tujuan dan komitmen bersama. Mereka berinteraksi dan bernegosiasi baik secara formal maupun informal dalam sebuah aturan yang disepakati. Untuk mendukung hal tersebut dimulai dari pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2024 yang akan menjalankan kolaborasi dalam penanganan *stunting* di Kecamatan Legok.

Dalam hal ini pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Legok yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tangerang dan Surat Keputusan Bupati No.050/Kep.403-Huk/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Tangerang dan dijabarkan melalui Surat Keputusan Camat Legok Nomor. 463/Kep.18-Kec.Lgk/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2024. Setelah itu, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Rembuk Stunting tentang komitmen bersama dalam penurunan stunting di Kecamatan Legok melalui kolaborasi dalam program Gerakan Orang Tua Asuh. Dalam menjalankan komitmen tersebut para pihak yang terlibat tanda tangan sebagai bentuk bukti komitmen bersama.

Aturan pada proses kolaborasi Gerakan Orang Tua Asuh adalah komitmen yang telah disepakati bersama. Adapun, komitmen yang dimaksud dalam kolaborasi ini adalah aktifnya para pihak yang terkait baik pemerintah maupun swasta dalam menjalankan peran masing-masing. Dalam hal ini untuk membangun komitmen bersama tersebut diperkuat dengan transparansi. Adapun, transparansi yang dilaksanakan melalui rapat pertemuan (Forkopincam) Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan) atau rapat bulanan, (Lokmin) Lokal Kayra Mingguan dan (Loktri) Lokal Karya Triwulan.

#### C. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan prose kolaborasi hal ini sebagaimana di kemukakakn oleh Ansell dan Gash (2007) mensyaratkan pimpinan lembaga tata kelola kolaboratif adalah seorang pemimpin fasilitatif, yang sanggup memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama di meja perundingan, bertatapmuka, membangun rasa saling percaya, berkomitmen, membuat rencana strategi, peta jalan, visi-misi dan tujuan bersama yang disepakati secara konsensus.

Dalam kaitanya dengan pengelolaan *collaborative governance* melalui program Gerakan Orang Tua Asuh di Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang

bahwa Camat Legok sebagai pemimpin di wilayah Kecamatan memiliki fungsi untuk mengkoordinir dan memfasilitasi dalam proses kolaborasi program Gerakan Orang Tua Asuh. Sebagai koordinator, mengingat posisinya yang dapat menjalin komunikasi atau penghubung antara Pemerintah, Puskesmas, Babinsa dan Binamas, TP. PKK Kecamatan, Swasta wilayah Legok PT. Sicer Indonesia, dan masyarakat. Mendorong program Gerakan Orang Tua Asuh dengan terus melakukan pendampingan kepada seluruh pihak yang terlibat. Camat Legok juga memfasilitasi pertemuan atau diskusi antar stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi ini dalam menyatukan tujuan dan komitmen bersama. Selain ini, pengawasan juga dilakukan dalam proses kolaborasi yang bertujuan untuk melihat perkembangan dan hambatan yang terjadi di proses kolaborasi Gerakan Orang Tua Asuh ini dalam upaya penurunan stunting di Kecamatan Legok.

#### D. Proses Kolaborasi

Kolaborasi seringkali dipandang hanya bergantung pada pencapaian yang mengacu pada tujuan yang ideal seperti komunikasi, kepercayaan, komitmen, saling memahami, dan hasil. Meskipun proses kolaborasi terjadi secara tidak teratur akan tetapi komunikasi adalah jantung dari kolaborasi sehingga kita memulai analisa dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, saling memahami dan hasil sementara.

Dialog tatap muka dalam proses *collaborative governance* pada Program Gerakan Orang Tua Asuh melalui Rembuk Stunting para stakeholders yang terlibat akan saling membuka ruang untuk berkomunikasi. Sebab, komunikasi merupakan salah satu media untuk menghadirkan kesepakatan bersama. Dalam Rembuk Stunting ini juga membahas tentang pembagian tanggung jawab masing-masing sektor yang terlibat. Dalam setiap proses dialog tatap muka, diperlukan adanya leading sector yang berfungsi untuk mengendalikan kondusifitas dialog. Bapak Camat Legok berperan sebagai leading sektor. Sementara itu, mitra non state, berperan sebagai pendamping program sekaligus mediator apabila proses dialog tatap muka berlangsung kaku dan alot dalam menghadapi persoalan. Dalam kata lain, Puskesmas, TP. PKK. Kecamatan Legok, Babinsa dan Binamas dalam hal ini berperan sebagai supporting sektor.

Dalam program Gerakan Orang Tua Asuh di kecamatan Legok membangun kepercayaan itu prosesnya pada saat proses dialog atau komunikasi bersama dengan NGOPI (Ngobrol Pinter). Nah, walaupun prosesnya tidak instan tetapi perlahan-lahan mulai terbangun karena dapat terlihat tingkat keseriusan dalam menjalankan program. Rrasa percaya antar satu sama lain ini dibangun salah satunya melalui proses komunikasi yang berlangsung intensif. Untuk itu, membangun rasa percaya tidak dapat dilihat sebagai tahapan yang terpisah dari indikator dialog tatap muka. Selain itu, dalam proses kolaborasi ini rasa percaya antar sektor yang terlibat dapat terbangun juga disebabkan oleh tingkat transparansi, keseriusan dan komitmen masing-masing sektor yang terlibat dalam menjalankan Program Gerakan Orang Tua Asuh ini.

Dalam Program Gerakan Orang Tua Asuh untuk membentuk komitmen dan akuntabilitas kinerja para sekholder yang terlibat pemerintah berinisiasi untuk membentuk komitmen bersama dengan seluruh pihak yang terlibat melalui tanda tangan bersama. Selain itu pula, tidak terlepas dari indikator dialog tatap muka dan rasa percaya antar satu sama lain, komitmen terhadap proses terbangun juga

disebabkan keberhasilan kolaborasi ini dalam melakukan dialog tatap muka dan membangun rasa percaya antar satu sama lain sehingga menciptakan rasa saling ketergantungan untuk bahu-membahu dalam menjalankan program Gerakan Orang Tua Asuh ini. Semakin tergantung suatu aktor dalam proses kolaborasi maka akan semakin memperkuat komitmen terhadap hubungan yang dijalin.

Berbagi pemahaman dapat berjalan dengan baik apabila pada masing-masing sektor yang terlibat dalam proses kolaborasi ini yakni memiliki rasa ketergantungan satu sama lain dan pemahaman terhadap tujuan bersama. Dalam artian, Program Gerakan Orang Tua Asuh ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila masing-masing sektor merasa bahwa tidak membutuhkan bantuan dari sektor lain untuk menyukseskan program ini sehingga masing-masing sektor tidak terbuka terhadap segala informasi dan pemahaman yang dimiliki dalam forum dialog tatap muka atau pertemuan langsung. Sebab, indikator berbagi pemahaman merupakan salah satu hal yang penting dalam proses kolaborasi. Saling berbagi pemahaman, informasi, data, maupun permasalahan yang dialami masing-masing sektor terkait Program Gerakan Orang Tua Asuh menjadi pendorong kemajuan program dan menciptakan proses kolaborasi yang efektif dan solutif terhadap persoalan *stunting* yang sedang terjadi di Kecamatan Legok.

Saling berbagi pemahaman juga merupakan salah satu unsur dalam peningkatan kapasitas pelaksana Program Gerakan Orang Tua Asuh yang terikat dalam penanganan permasalahan *stunting* dapat menciptakan kegiatan-kegiatan baru yang terintegrasi dengan Program Gerakan Orang Tua Asuh sebagai wujud komitmen pada tujuan Program Gerakan Orang Tua Asuh, seperti misalnya kegiatan-kegiatan dalam penanggulangan *stunting* seperti Dering Pagi (Kader Pendamping dalam Upaya Peningkatan Status Gizi), SALUR (Satu Telur 1 Hari untuk batita *stunting*) PONDASI CERDAS (Cegah Resiko *Stunting* dengan ASI), MAMA CENTING (Makan Bersama Cegah *Stunting*) dan KUMBANG GITA (Kunjungan timbang dan pantau tinggi balita) dalam hal monitoring dan evaluasi kegiatan oleh Camat Legok yang dalam hal ini berperan sebagai fasilitator yang didampingi oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Legok, Ketua TP.PKK Kecamatan Legok, Puskesmas, Babinsa dan Binamas.

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Dalam Program Gerakan Orang Tua Asuh yang terlaksana di Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang sudah menunjukan hasil dari proses yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Kecamatan Legok, Babinsa dan Binamas, Puskesmas, TP.PKK Kecamatan Legok, dan Pt. Sicer Indonesia yang sudah berkontribusi dalam kolaborasi ini dengan menunjukkan hasil yang baik dengan terlihatnya jumlah angka balita *stunting* menurun di Kecamatan Legok. Tentu keberhasilan dalam indikator ini menjadi bukti nyata pendukung keberhasilan indikator yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

Hasil sementara yang didapatkan dalam proses kolaborasi ini akan menjadi motivasi bagi para stakeholders yang terlibat untuk terus meningkatkan kapasitas kinerjanya dalam melaksanakan Program Gerakan Orang Tua Asuh melalui desain *collaborative governance* dalam upaya mempercepat penurunan angka balita *stunting* di Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. Adapun, berikut beberapa hasil sementara yang berhasil diwujudkan melalui proses kolaborasi dalam Program Gerakan Orang Tua Asuh sejak pelaksanaannya pada tahun 2022, yaitu:



PUSKESMAS	2021			2022			2023		
	D	ST	%	D	ST	%	D	ST	%
Puskesmas Legok	3854	157	4,07	4298	189	4,40	4495	126	2,80
Puskesmas Bojongkamal	1436	20	1,39	1450	79	5,45	1978	54	2,73
Puskesmas Caringin	1818	233	12,82	1685	81	4,81	2340	61	2,61
<b>TOTAL</b>	<b>7108</b>	<b>410</b>	<b>5,77</b>	<b>7433</b>	<b>349</b>	<b>4,70</b>	<b>8813</b>	<b>241</b>	<b>2,73</b>

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan angka prevalensi stunting di Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, sebelum adanya Program Gerakan Orang Tua Asuh, angka prevalensi stunting di Kecamatan Legok sebanyak 5,77%. Namun, pada tahun 2022 hingga 2023 setelah adanya Program Gerakan Orang Tua Asuh, terjadi penurunan angka prevalensi stunting. Pengukuran prevalensi stunting tiap tahunnya diukur berdasarkan jumlah balita yang diukur melalui posyandu dengan turut mempertimbangkan data pada tahun sebelumnya. Tiap-tiap balita yang terdiagnosa stunting apabila pada tahun berikutnya masih terdiagnosa hal serupa, maka ikut menambah prevalensi stunting ditahun tersebut. Selain itu, hasil sementara yang didapat melalui proses kolaborasi Program Gerakan Orang Tua Asuh ini, tidak hanya pada penurunan angka prevalensi stunting. Namun juga keberhasilan dalam meningkatkan antusiasme masyarakat, dalam hal ini orang tua, untuk membawa anaknya ke berbagai kegiatan dalam upaya penangan dan penurunan *stunting* di Kecamatan Legok.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan *Collaborative Governance* dalam penurunan stunting melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh menurut teori Ansell dan Gash melalui fenomena proses kolaborasi dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi dimulai dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara yang digunakan sudah berjalan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari penurunan angka stunting yang didorong dengan adanya inovasi kegiatan-kegiatan kelas stunting yang diadakan di Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanni. 2019. *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENCAPAIAN TARGET SANITASI LAYAK DI KOTA PADANG*. Prosiding Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan (Pekanbaru, 16 November 2019)
- Ansell, C. dan Gash, A. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*, *Journal of Publik Administration Research and Theory*. Oxford Journals (JPART), Vol.18, 543-571.

- Emmerson, K, Nabatchi, T dan Balogh, S. 2011. An Integrative Framework for Collaborative Governance, Oxford University Press on behalf of the Journal of Public Administration Research and Theory.
- Sinaga Emy Pardomuan, Srimelda Bangun, Felix Kasim. 2022. *Evaluasi Peranan Penyuluh KB Dalam Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022*. Vol.5 No.2 Hal. 205-210 ISSN (Print): 2614 – 8064 Agustus 2022 ISSN (Online): 2654 – 4652.
- Islamy, La Ode Syaiful. 2018. *Collaborative Governance: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dewi, N. L. Y. 2019. *DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial e-ISSN: 2581-2424 Vol 3, No. 2, Agustus 2019 <https://journal.undiknas.ac.id>.
- Sukanti, Nur Faidati. 2021. *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN SLEMAN*. Jurnal Caraka Prabu Vol.5 No. 1 Juni 2021.
- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI). 2021. Buku Saku: *Hasil Studi Status Gizi Indonesia Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. *Laporan Pelaksanaan Integrasi SUSENAS Maret 2019 dan SSGBI Tahun 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
- Peraturan Bupati (Pergub) Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan Terintegrasi Di Kabupaten Tangerang
- Surat Keputusan Bupati No.050/Kep.403-Huk/2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Di Kabupaten Tangerang.